UNAN

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1996-2006

Skripsi oleh:

YENI MAYASARI
01053120066

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat- Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA
Tahun 2009

S
338.907
May
a
c-2009
2009

R. 18168 / 108613

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1996-2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi oleh:

YENI MAYASARI
01053120066

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat- Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA
Tahun 2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: YENI MAYASARI
NIM	: 01053120066
JURUSAN	: EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH	: KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI	:ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1996-2006

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal : 27 Januari 2009	Ketua :	Dr. Azwardi, M.Si NIP 132050494
Tanggal : 9 januari 2009	Anggota :	Drs. M. Syirod Saleh, M. Si NIP 131412510

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA	: YENI MAYASARI
NIM	: 01053120066
JURUSAN	: EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH	: KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI	:ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1996-2006

Telah diuji di depan panitia ujian komprehenshif pada tanggal 11 februari 2009 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehenshif
Indralaya, 11 februari 2009

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Dr. Azwardi, M.Si	**Drs. H. Syirod Saleh, M. Si**	**Dr.Hj. Rosmiyati Ch Saleh, M. Si**
NIP 132050494	**NIP 131412510**	**NIP 131467171**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Prof. Dr. Taufiq Marwa, M. Si
NIP. 132050493

Motto:

Jangan hiraukan opini negatif anda,
bentuklah kebiasaan bereaksi agresif
dan positif terhadap ancaman,
masalah dan kegagalan.
Fokuskan diri anda pada sasaran akhirnya,
terlepas apapun yang terjadi saat ini.

Pohon besar tidak tumbuh dengan begitu saja
Semakin kuat angin bertiup menerpanya
Semakin kuat si pohon jadinya.

Apa yang kita terima adalah refleksi dari apa yang kita perbuat
Dan apa yang kita perbuat adalah amanah dari allah

Kupersembahkan untuk:

- Kedua Orang Tuaku tercinta
- Bibi dan pamanku Terkasih
- Adik-adikku Tersayang
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996-2006", sebagai salah satu syarat untuk menyelesasikan pendidikan strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini didasari oleh berbagai fenomena yang muncul dan terbatasnya teori mengenai hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu topik mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi masih hangat dan terus digali dan diuji pada berbagai penelitian, untuk mencapai hasil yang mutlak antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah dimulai sejak 1 januari 2001, dan salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalah desentralisasi fiskal. Oleh karenanya penulis mencoba untuk mengkaji hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Propinsi Sumatera Selatan. Setelah mengkaji beberapa teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, maka penulis dapat menyusun model yang dianggap dapat menjelaskan kondisi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi Sumatera Selatan.

Melalui penelitian ini ditemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi sumatera Selatan, yang berarti dengan adanya implementasi Desentralisasi fiskal memang akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan.

Indralaya, Februari 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Alhamdulilah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat meyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Pengaruh Desentralisasi fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996-2006".**

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi petunjuk dan nasihat sehingga selesainya skripsi ini khususnya kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, karena kalian aku ada di dunia ini, maafkan anakmu yang baru bisa memberikan ini.
2. Bibi dan pamanku, terima kasih telah menjadi orangtua kedua bagiku, terima kasih banyak atas dukungannya yang tak kenal lelah dan tak ternilai harganya.
3. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, MBA, selaku rektor Universitas Sriwijaya Palembang.
4. Bapak Dr. H. Syamsurijal AK selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si selaku ketua jurusan ekonomi pembangunan fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
6. Bapak Drs. Nazeli Adenan M.Si selaku Sekretaris jurusan ekonomi pembangunan fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
7. Bapak Dr. Azwardi, M.Si selaku pembimbing skripsi I. Terima kasih atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama proses pembuatan skripsi.
8. Bapak Drs. M. Syirod Saleh, M.Si selaku pembimbing skripsi II. Terima kasih atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama proses pembuatan skripsi.

9. Ibu H. Rosmiyati Ch Saleh, selaku dosen penguji pada ujian koprehenshif terima kasih atas bimbingan, saran dan kritiknya.
10. Bapak Imam Asngari, SE, M.Si selaku pembimbing akademik. Terima kasih atas semua bantuannya selama ini.
11. Seluruh dosen pegajar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan selama menjadi mahasiswi di Universitas sriwijaya.
12. Yuk Semi yang dipenghujung jalan telah memberikan bantuan yang tak ternilai harganya. Terima kasih sebesar-besarnya.
13. Kak Adi, terima kasih banyak atas semua bantuannya selama ini.
14. Seluruh Adik-adikku terima kasih atas doa, dukungan, bantuan dan telah menjadi semangat yang paling ampuh untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh keluarga besarku, yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih buat semuanya.
16. Gustri, terima kasih sudah menjadi kakak, sahabat bahkan guru yang terbaik, terima kasih atas semua bantuan, dukungan, semangat dan nasehat-nasehatnya.
17. Desy, Kokom, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan selama ini dan maaf sering merepotkan.
18. Sima, Siti, Ana, Yani, Sandul, Santi, terima kasih sudah menjadi saudara-saudaraku selama ini, terima kasih atas waktu dan kesetiaanya disaat penulis, bahagia, jatuh cinta, patah hati dan putus asa sekalipun. Terima kasih atas dukungan, doa, bantuan dan semangatnya.
19. Tot terima kasih atas kebersamaannya semenjak penulis menginjakkan kaki disini, dari susah hingga senang dari jomblo sampai sekarang, terima kasih sudah menjadi

20. Kakak ku, terima kasih atas semua bantuannya selama penulisan skripsi ini, terima kasih sudah menjadi tangan kedua disaat penulis tidak berdaya. Terima kasih atas cinta dan perhatiannya.
21. Tea, Icha, Renov, Adit, Pipit, Arti, Rida, Ulan, Mbak Nova, Esti, Ira terima kasih atas semua bantuan dan kebersamaannya selama ini.
22. Ratih, Inoy, yani terima kasih sudah menjadi teman serumah yang terbaik.
23. Teman-teman seangkatan EP 05, terima kasih atas dukungannya selama ini dan mari berjuang bersama.
24. Keluarga besar HIMAJA terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.

Indralaya, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPRHENSIF	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	9
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Desentralisasi Fiskal	12
2.2.Indikator Desentralisasi Fiskal	13
2.1.1. Penerimaan Pemerintah	14
2.2.2. Pengeluaran Pemerintah	17
2.3. Pertumbuhan Ekonomi	20
2.3.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow	20
2.3.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar	21
2.4. Variabel-variabel lain yang mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi	22

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 090404
TANGGAL : 05 MAR 2008

2.4.1. Pajak Daerah 22
2.4.2. Investasi..... 23
2.4.3. Pengangguran..... 23
2.5. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi..... 24
2.6. Penelitian Terdahulu 25
2.7. Kerangka Pemikiran..... 29
2.8. Hipotesis..... 31

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian..... 32
3.2. Jenis Penelitian..... 32
3.3. Data dan Sumber Data 33
3.4. Metode Pengumpulan Data..... 34
3.5. Batasan Oprasional Variabel..... 34
3.6. Metode Analisis 37
3.6.1. Tehnik Regresi Berganda..... 37
3.6.2. Asumsi Klasik 37
3.7. Uji Statistik..... 40
3.7.1. Koefisien Determinan (R^2)..... 41
3.7.2. Uji F 41
3.7.3. Uji t..... 42

BAB IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan..... 44
4.2. Perkembangan Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 46
4.3. Perkembangan Pengeluaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan 51
4.4. Perkembangan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan 53
4.5. Gamabaran Umum Tingkat pengangguran Propinsi Sumatera Selatan..... 55
4.6. Gamabaran Umum Investasi (PMA dan PMDN) Propinsi Sumatera Selatan..... 56

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Model Regresi 58

5.1.1. Hasil Estimasi Model 58

5.1.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 59

5.1.2.1. Uji Multikolinieritas .....

5.1.2.2. Uji Autokorelasi 60

5.1.2.3. Uji Heterokedaktisitas 61

5.1.2.4. Uji Normalitas 62

5.1.3. Hasil Uji Statistik 63

5.1.3.1. Koefisien Determinan (R^2) 63

5.1.3.2. Uji F 63

5.1.3.3. Uji t 64

5.2. Pembahasan Hasil Analisa 65

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 75

6.2. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 81

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006 ADHK 2000 6

Tabel 1.2 : Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006 7

Tabel 1.3 : Rasio Total Penerimaan Daerah Terhadap Penerimaan Nasional Seluruh Propinsi di Indonesia 9

Tabel 4.1. : PDRB Propinsi sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006 ADHK 2000 44

Tabel 4.2 : Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sebelum Otonomi Daerah Periode 1996 sampai 2001 47

Tabel 4.3 : Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Setelah Otonomi Daerah Periode 2001 sampai 2006 48

Tabel 4.4 : Perkembangan Penerimaan Pemerintah Pusat 50

Tabel 4.5 : Perkembangan Bantuan Pemerintah Pusat 50

Tabel 4.6 : Realisasi Pengeluaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006 52

Tabel 4.7 : Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Pusat 53

Tabel 4.8 : Perkembangan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996 Sampai Tahun 2006 54

Tabel 4.9 : Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Penangguran Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996-2006 55

Tabel 4.10 : Perkembangan Investasi Propinsi Sumatera Selatan (PMA dan PMDN)1996 Sampai 2006 57

Tabel 5.1 : Hasil Estimasi desentralisasi Fiskal 58

Tabel 5.2 : Hasil VIF Test 59

Tabel 5.3 : Hasil LM Test 60

Tabel 5.4 : Hasil White Test 61

Tabel 5.5 : Hasil Uji t 64

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	: PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006 ADHK 2000	6
Tabel 1.2	: Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006.....	7
Tabel 1.3	: Rasio Total Penerimaan Daerah Terhadap Penerimaan Nasional Seluruh Propinsi di Indonesia	9
Tabel 4.1.	: PDRB Propinsi sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006 ADHK 2000	44
Tabel 4.2	: Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sebelum Otonomi Daerah Periode 1996 sampai 2001	47
Tabel 4.3	: Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Setelah Otonomi Daerah Periode 2001 sampai 2006.....	48
Tabel 4.4	: Perkembangan Penerimaan Pemerintah Pusat	50
Tabel 4.5	: Perkembangan Bantuan Pemerintah Pusat.....	50
Tabel 4.6	: Realisasi Pengeluaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006.....	52
Tabel 4.7	: Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Pusat	53
Tabel 4.8	: Perkembangan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996 Sampai Tahun 2006.....	54
Tabel 4.9	: Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Penangguran Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996-2006.....	55
Tabel 4.10	: Perkembangan Investasi Propinsi Sumatera Selatan (PMA dan PMDN)1996 Sampai 2006.....	57
Tabel 5.1	: Hasil Estimasi desentralisasi Fiskal	59
Tabel 5.3	: Hasil VIF Test.....	60
Tabel 5.4	: Hasil LM Test.....	61
Tabel 5.5	: Hasil White Test.....	62
Tabel 5.6	: Hasil Uji t	63

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 : Perbandingan Porsi Pengeluaran Daerah yang Merupakan Kewenangan Daerah (Discretion) dan Di Luar Kewenangan Daerah (non discretion) 4

Grafik 4.1 : PDRB dengan Migas dan Tanpa Migas Propinsi Sumatera Selatan ADHK 2000 45

Grafik 5.1 : Uji Normalitas 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal 81

Lampiran 2 : Hasil Uji VIF 81

Lampiran 3 : Hasil LM Test 82

Lampiran 4 : Hasil Uji Normalitas 82

Lampiran 5 : Hasil White Test 83

Lampiran 6 : Data Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Terhadap Penerimaan Nasional (Rasio)..... 83

Lampiran 7 : Data Pengeluaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Terhadap Penerimaan Nasional (Rasio)..... 84

Lampiran 8 : Data Total Pajak Propinsi Sumatera Selatan Terhadap Total Pajak Pusat (Rasio)..... 84

Lampiran 9 : Data Total Investasi Propinsi Sumatera Selatan (Dalam Triliyun Rupiah..... 85

Lampiran 10 : Data Persentase Tingkat Pengangguran Propinsi Sumatera Selatan..... 85

Lampiran 11 : Data Penerimaan Daerah Menurut Propinsi Di Di Indonesia..... 86

Lampiran 12 : Rasio Penerimaan daerah Terhadap Penerimaan nasional..... 87

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan pada periode 1996 sampai 2006. Data yang digunakan adalah data skunder, dengan menggunakan metode regresi linier sederhana.

Hasil uji klasik menujukan bahwa tidak terjadi multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedaktisitas dalam model regresi yang digunakan. Uji F juga menunjukan bahwa variabel desentralisasi fiskal (desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran), pajak daerah, investasi, pengangguran dan varibel dummy secara serentak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat dari hasil uji F, yang mempunyai nilai F statistik yang lebih besar dari F tabel (6,675>2,94).

Penulis mendapat hasil bahwa, penerimaan daerah relatif terhadap penerimaan nasional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi Sumatera Selatan sedangkan pengeluaran daerah relatif terhadap pengeluaran nasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan, yang berarti bahwa wewenang-wewenang pengeluaran sebagian besar telah diserahkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Program-program pembangunan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat sekarang banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan secara umum efesiensi pelayanan publik telah berjalan dengan baik di Propinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah, pengeluaran daerah.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Abstract

The main object of this research is to see how fiskal decentralization influence to economic growth of Province South Sumatra for period of 1996 until 2006, the data used in this study are secondary data, by using a simple linier regression equation.

The Result of test classical shows that there are not happened by the multikolinieritas, autokorelasi and heterokedaktisitas in used model regresi. Test F also shows that fiskal variabel decentralization (decentralize the revenue and decentraliz the expenditure), regional tax, invesment, unemployment and dummy varibel at a time have an effect on to economic growth in South Sumatra Province, it can be seen from result F test, the statistic grade F are bigger than the table grade F (6,675>2,94).

Writer get the result that regional revenue relative to national revenue don't have the influence to economic growth South Sumatra province. While government expenditure relative to national expenditure have the influence which are positive to economic growth South Sumatra Province, meaning that expenditure authority of most have been by central government to regional government. previous Development programs handled by central government now a lot isconducted by local government and in general public efesiensi service have walked better in South Sumatra Province

Keyword: Fiskal Decentralization, economic growth, regional revenue, regional government.

Abstract

The main object of this research is to see how fiskal decentralization influence to economic growth of Province South Sumatra for period of 1996 until 2006, the data used in this study are secondary data, by using a simple linier regression equation.

The Result of test classical shows that there are not happened by the multikolinieritas, autokorelasi and heterokedaktisitas in used model regresi. Test F also shows that fiskal variabel decentralization (decentralize the revenue and decentraliz the expenditure), regional tax, invesment, unemployment and dummy varibel at a time have an effect on to economic growth in South Sumatra Province, it can be seen from result F test, the statistic grade F are bigger than the table grade F (6,675>2,94).

Writer get the result that regional revenue relative to national revenue don't have the influence to economic growth South Sumatra province. While government expenditure relative to national expenditure have the influence which are positive to economic growth South Sumatra Province, meaning that expenditure authority of most have been by central government to regional government. previous Development programs handled by central government now a lot isconducted by local government and in general public efesiensi service have walked better in South Sumatra Province

Keyword: Fiskal Decentralization, economic growth, regional revenue, regional government.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang dimulai beberapa tahun yang lalu di negara kita telah merambah keseluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek yang paling banyak disoroti adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud disini adalah aspek hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang semakin luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia, sudah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah, praktek internasional desentralisasi fiskal baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "*Money Follows Functions*", yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Woloyo,2007).

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini telah mengubah secara drastis hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah

dan hubungan antar sektor dalam pemerintahan. Sejak 1 Januari 2001 telah terjadi penataan ulang hubungan secara vertikal yakni antara pemerintah pusat, pemerintah Propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Penataan ulang juga terjadi secara horizontal di tingkat pusat (antara eksekutif, legislatif dan yudikatif), dan di tingkat daerah (Hirawan, 2007).

Salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar suatu Negara maka semakin kompleks dan "heterogen" pemerintahannya, yang tercermin dari tingkatan pemerintah daerah. Desentralisasi adalah cara untuk melakukan penyesuaian tata kelola pemerintahan dimana dilakukan distribusi fungsi pengambilan keputusan dan kontrol. Desentralisasi fiskal menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi (Hirawan, 2007).

Selain itu isu desentralisasi dianggap sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian dari banyak ahli antara lain oleh Joko Waloyo (2007) dalam jurnalnya yang berjudul dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia, menyimpulkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dua mekanisme transmisi, yaitu:

1. Dana bagi hasil PBB BPHTB dan PPh menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dana bagi hasil SDA (DBSDA) menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatif.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai pemerata fiskal daerah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Faisal (2002) meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat Propinsi yang diaplikasikan di Indonesia dan menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut Faisal efek negatif yang timbul disebabkan oleh penggunaan dana oleh pemerintah lokal yang kurang bertanggung jawab, rendahnya skill para aparat pemerintah dan juga akuntabilitas politik yang labil serta sebagai tambahan bahwa kebijakan desentralisai fiskal dipandang terlalu tergesa-gesa diambil tanpa birokrasi khusus dan persiapan yang matang.

Selain itu Zhang dan Zou (1998) juga meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat Propinsi di China dan menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif ini dianggap memang lebih baik masalah kebijakan fiskal bangsa dengan eksternalitas yang luas ditangani langsung oleh pemerintah pusat.

Di Indonesia sendiri pada awal penerapan desentralisasi fiskal perubahan pengolaan keuangan oleh daerah dinilai cukup fleksibel, dimana terjadi diskresi (kebijakan dan kewenangan) penuh oleh daerah di Indonesia dalam pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan. Misalkan perbandingan pada tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 2001, gambaran APBD Propinsi dan kabupaten/kota, kontribusi sumber-sumber penerimaan daerah yang secara bebas ditentukan sepenuhnya oleh daerah (PAD ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak) hanya sekitar 20% sedangkan propersi ini sejak diberlakukannya UU No 25 tahun 1999 meningkat

secara signifikan menjadi sekitar 96,7%, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini:

Grafik 1.1
Perbandingan Porsi Pengeluaran Daerah Yang Merupakan Kewenangan Daerah (Discretion)dan Diluar Kewenangan Daerah (Non Discretion)

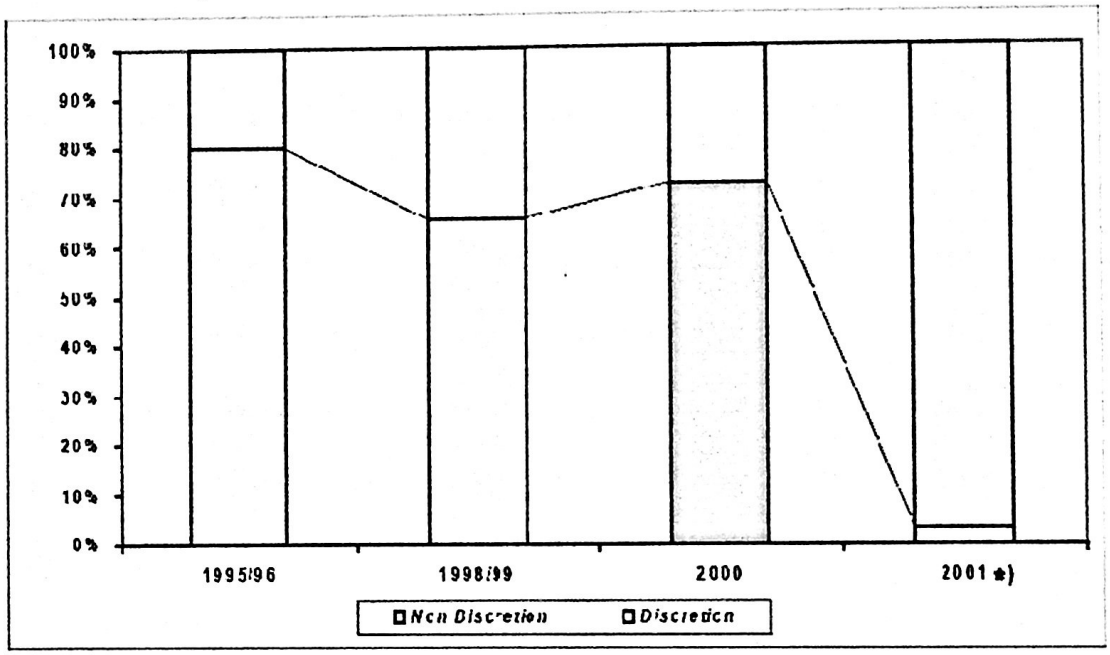

Sumber: Sidik, Machfud (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Non Discretion = Pendanaan dari Sumbangan/Bantuan dan DAK (tahun 2001).
Discretion = Pendanaan dari PAD, BHPBP, dan DAU (tahun 2001).
*) Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal.

Berdasarkan Grafik 1.1, dapat dikatakan setelah diterapkan desentralisasi fiskal di Indonesia ada peningkatan penerimaan dari sumber-sumber yang ada di daerah-daerah dari pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana penerimaan-penerimaan tadi digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam upaya peningkatan kemajuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah (Sidik, 2002).

Selama berapa dekade banyak negara berkembang dan negara maju mencoba untuk menerapkan desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk mengatasi

ketidakefektifan dan ketidakefesienan pemerintah, ketidakstabilan makroekonomi, Serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Lazimnya untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah (ragional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan (Sukirno, 2004: 61). Sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas harga konstan yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa disuatu wilayah (Sukirno, 2004: 9). Kondisi pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan dapat diproyeksikan oleh PDRB Sumatera Selatan atas harga konstan selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir masing-masing Rp. 47.957.856 juta (1997), Rp. 50.251.257 juta (1998), Rp. 46.928.824 juta (1999), Rp. 48,419,231 juta (2000), Rp. 51,283,821 juta (2001), Rp. 43,643,276 juta (2002), Rp. 45,247,401 juta (2003), Rp. 47,344,395 juta (2004), Rp. 49,633,536 juta (2005), Rp. 52,215,287 (2006). Berdasarkan angka-angka PDRB tersebut di atas diketahui PDRB Propinsi Sumatera Selatan tiap tahun mengalami peningkatan, sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian sesuai yang dilampirkan dengan Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan
Periode 1997-2006
Atas dasar harga konstan 2000 (Dalam Juta Rupiah).

Tahun	PDRB Dengan Migas	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Tanpa Migas	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1996	44.364.049	-	31.473.479	-
1997	47.957.856	8,03	34.239.951	8,79
1998	50.251.257	4,85	36.296.687	6,01
1999	46.928.824	-6,61	33.186.131	-9,37
2000	48.419.231	3,08	33.692.602	1,53
2001	51.285.821	5,59	34.892.862	3,58
2002	43.643.276	3,79	30.083.324	4,44
2003	45.247.401	3,67	31.810.725	5,74
2004	47.344.395	4,63	33.969.083	6,78
2005	49.633.536	4,83	36.317.674	6,91
2006	52.215.287	5,20	38.971.463	7,3

Sumber: Sumatera Selatan Dalam angka. BPS Propinsi Sumatera Selatan (Data diolah).

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan dengan migas tahun 2006 mencapai 5,20 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005, yaitu sebesar 4,83 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi 2004 sebesar 4,63 persen. Lebih tinggi dibandingkan tahun 1997 yang sebesar 3,67 persen dan tahun 2002 sebesar 3,79 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 sebesar 3,59 persen yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 yang hanya sebesar 3,08 persen. Perbaikan ekonomi tahun 2006 ini sangat dipengaruhi oleh kesetabilan kondisi ekonomi ragional sebagai akibat dari penurunan dampak kenaikan harga BBM yang sempat melemahkan perekonomian regional pada akhir tahun 2005 (Azwardi,2008).

Sejak diberlakukannya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan

pengolaan keuangan daerah demi menunjang percepatan pembangunan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Kebijakan desentralisasi fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga kemudian disusun dalam APBD yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik rutin maupun pembangunan. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam APBD akan terurai dalam berbagai pos anggaran dan pada umumnya realisasi penerimaan dan pengeluaran baik dalam APBD pemerintah Propinsi Sumatera Selatan maupun APBD pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Selatan adalah seimbang.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Periode Tahun 1996-2006

Tahun	Penerimaan Daerah Dalam juta Rupiah	Pertumbuhan penerimaan daerah
1996/1997	132.773	-
1997/1998	271.993	104,86
1998/1999	295.118	8,50
1999/2000	487.606	65,22
2000	561. 428	15,13
2001	674. 443	20,13
2002	806. 178	19,53
2003	1. 042. 002	29,25
2004	1. 088. 213	4,43
2005	1. 392. 063	27,92
2006	1. 867. 311	34,14

Sumber: Sumatera Selatan Dalam angka. BPS Propinsi Sumatera Selatan (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat, dari tahun 1996 sampai 2006 penerimaan daerah terus meningkat, tahun 2000 penerimaan daerah sebesar 561.428 juta rupiah, 2001 sebesar 674.443 juta rupiah, 2002 sebesar 806.178 juta rupiah, 2003 sebesar 1.042.002 juta rupiah, 2004 sebesar 1.088.213 juta rupiah, 2005 sebesar 392.063 juta rupiah, 2006 sebesar 1.867.311 juta rupiah, dengan pertumbuhan penerimaan daerah tertinggi sebesar 104,86 yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Meskipun beberapa data menggambarkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi akibat dari realisasi dari desentralisasi fiskal, tetapi sebenarnya kenaikan yang terjadi itu dapat terhitung kecil karena pada sebagian daerah di Indonesia sangat tergantung pada bantuan (grant) dari pemerintah pusat hal ini bisa dilihat dari tingginya DAU/DAK yang diterima oleh daerah dibandingkan dengan penerimaan yang doperoleh daerah tersebut, Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah (Yani dalam Haryati; 2006).

Sedangkan pada sisi lain, desentralisasi fiskal menimbulkan distorsi ekonomi pada beberapa daerah, karena salah satu cara untuk menigkatkan PAD daerah adalah dengan ekstensifikasi pajak, tapi karena adanya hal ini maka investasi di daerah yang bersangkutan menjadi turun, sebab dengan pajak yang tinggi dan beraneka ragam membuat para investor malas menginvestasikan modalnya di daerah tersebut. Kondisi para birokrat daerah semakin menjadi-jadi dengan adanya pelimpahan wewenang dari pusat membuat korupsi dana dari pusat semakin meningkat, sebagai mana yang diuraikan oleh Vazquez dan MacNab (2001) dalam working peper-nya bahwa dengan pengimplementasian desentralisasi fiskal kemungkinan korupsi secara umum terjadi pada tingkat lokal karena ada kesempatan yang lebih besar dan dalil untuk kepentingan daerah, pegawai pemerintah lokal memiliki kekuasaan yang lebih besar dan sedikitnya rintangan yang ada, yang dikarenakan adanya perbedaan yang kabur antara politikus dan birokrat.

Tabel 1.3
Rasio Total Penerimaan Daerah
Terhadap Total Penerimaan Nasional Menurut Propinsi Di Indonesia

Propinsi	2002	2003	2004	2005
Nangroe Aceh Darussalam	0.03916251	0.044061174	0.054517615	0.008660059
Sumatera Utara	0.030053706	0.033545415	0.0000353	0.032272723
Sumatera Barat	0.014309918	0.014643498	0.015463059	0.015709642
Riau	0.054244113	0.051455255	0.049090982	0.046107179
Jambi	0.011444284	0.01314938	0.014567823	0.011352006
Sumatera Selatan	0.020534092	0.022236023	0.023990846	0.022459512
Bengkulu	0.006035044	0.007477273	0.007395197	0.006825026
Lampung	0.001682836	0.01747224	0.018711178	0.017555522
Bangka Belitung	0.006939948	0.007182522	0.007755058	0.00839113
Kepulauan Riau	0	0	0.003603817	0.008459742
DKI Jakarta	0.273092211	0.045834978	0.247954824	0.259486486
Jawa Barat	0.070232549	0.082273504	0.007743935	0.079002906
Jawa Tengah	0.065740138	0.065389974	0.061273537	0.055501031
DI Yogyakarta	0.014057667	0.014595011	0.015553733	0.014372186
Jawa Timur	0.090033782	0.084855148	0.083577408	0.067560023
Banten	0.026406451	0.025606718	0.027392649	0.031131024
Bali	0.02263213	0.016586375	0.016803395	0.016283936
Nusa Tenggara Barat	0.010118098	0.010063237	0.009633736	0.010720965
Nusa Tenggara Timur	0.012897753	0.012855465	0.012410281	0.009121225
Kalimantan Barat	0.012278384	0.012172726	0.012908123	0.012760352
Kalimantan Tengah	0.009574934	0.010412622	0.010332968	0.011022868
Kalimantan Selatan	0.013808468	0.012992758	0.012731363	0.014792302
Kalimantan Timur	0.061694405	0.065523336	0.058335271	0.048892171
Sulawesi Utara	0.011821707	0.009906296	0.008186648	0.008050644
Sulawesi Tengah	0.007501699	0.008551384	0.008732058	0.007886333
Sulawesi Selatan	0.019645073	0.02054288	0.021662173	0.018768387
Sulawesi Tenggara	0.00704879	0.007927717	0.007151564	0.007714176
Gorontalo	0.003836257	0.004853952	0.005174033	0.004965889
Maluku	0.008061019	0.008823242	0.008116683	0.01051578
Maluku Utara	0.005333823	0.005904139	0.005241414	0.007407704
Papua	0.054622967	0.049068621	0.048028633	0.048332373

Sumber: Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS Propinsi Sumatera Selatan. Berbagai Edisi. (Diolah dari lampiran 11).

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui rasio penerimaan daerah seluruh Propinsi di Indonesia terhadap penerimaan nasional dari tahun ketahunnya belum menunjukan peningkatan yang berarti walaupun otonomi daerah sudah diimplementasikan sejak januari 2001, bahkan disebagian propinsi di Indonesia mengalami penurunan.

Penelitian ini dianggap penting karena Indonesia telah melaksanakan desentralisasi fiskal sejak tahun 1974 berdasarkan UU No 5 tahun 1974, yang kemudian karena banyaknya tekanan dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk lebih mempercepat proses desentralisasi fiskal terutama daerah tingkat II, maka muncullah UU No 22 tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 25 tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang menjadi landasan yang kuat dalam proses desentralisasi.[1]

Berangkat dari paparan fakta yang ada dan teori yang dikemukakan beberapa ahli sebelumnya yang mengemukakan bahwa desentralisasi dipandang sebagai suatu mekanisme dalam suatu kompetisi pemerintahan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi desintegrasi antar wilayah, dan beberapa keuntungan lainnya maka penelitian ini mengangkat permasalahan dengan judul **"Analisa Pengaruh Desentralisasi fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996-2006"**

---

[1]UU No 22 Th 1999 dan UU No 25 Th 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah,tetapi di era pemerintahan presiden Megawati, kedua UU tersebut di revisi yang mana pada akhirnya melahirkan UU No 32 Th 2004, dan UU No 33 tahun 2004.

1.2. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan pada periode 1996-2006

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan pada periode 1996-2006

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai jenjang strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2. Bagi peneliti menambah pengetahuan yang selama ini didapat di bangku kuliah yang kemudian dikembangkan dalam bentuk penelitian.
3. Sebagai masukan yang berarti bagi pembuat kebijakan pemerintah daerah setempat, dan lembaga-lambaga terkait dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad., Lincoln . , 2004, Ekonomi Pembangunan , UPP YKPN, Yogyakarta.

Azwardi., 2007, *Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional Fakultas Tehnik Tambang Universitas Sriwijaya.

Azwardi., *The The Impact Of Fiscal Decentralization on Interregional Economic performance in Indonesia,* Wisma Makara, Kampus UI Depok.

Aswarodi., 2001, Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan UU N0 25 Th 1999 Kabupaten Lampung Selatan, dlm Abdul halim (ed), *Bunga Rampai*,UUP YKPN, Yogyakarta.

Bambang Hirawan, Susiati., 2007, Desentralisasi Fiskal Sebagai Salah Satu Usaha Peningkatan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) Di Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Budino, Wilopo., Desentralisasi Ekonomi dan Pembangunan, Jurnal Ekonomi, No2 desember.

Dumairy.,1997. *Perekonomian Indonesia. Jakarta.* PT. Erlangga,

Faisal., 2002, *Fiscal Desentralization and Economic Growth at Provincial Level in* Indonesia, *Tesis (S2)*, School policy Studies, Gorgenia State University, Atlanta, Gorgia.

Gujarati, Damodar N. , 1997, *Ekonomitrika Dasar*, Terjemahan, Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta. .

Haryati, Sri., Perbandingan Kinerja keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Studi Kasus Kabupaten Seleman Periode 1998 - 2000 dan 2001 - 2003, Skripsi, Universitas Islam Indinesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta.

Jhingan, M, L., 2000, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Press, Jakarta.

Khusaini, M. , 2006 , Kajian Desntralisasi Fiskal, Pengaruhnya terhadap Efesiensi Ekonomi Public Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Kesejatraan Masyarakat, *Desertasi (S3)*. Ilmu Study Pembangunan, Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya,Malang.

Kuncoro, Mudarajad, 2004, *Metode Kuantitatif*, Penerbit AMP YKPN,Yogyakarta.

Lorena, Gita., 2008, Analisis Hubungan kuasalitas antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Skripsi (S1), Ilmu Study Pembangunan, fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Menkiw, N., Gorgenia, 2000, *Macroeconomic*,5th Edition,world Publisher,Medison Avanue, New York.

Musgrave, RA dan Musgrave, PB. 1991. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi ke lima.Jakarta; Erlangga.

Noviyanto, Haris., 2005, Analisis Perimbangan Pusat- Daerah Serta Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota di Yogyakarta Tahun 1994 / 1995 - 2003, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Setiaji,Wirawan.,2007,Peta Kemampuan keuangan setelah Otonomi daerah,Fakultas Eknomi Universitas Kasih Satya Wacana,Makasar.

Shah, Anwar. 2003. *Ensuring Accountability When There Is No Bottom Line*. Vol 1 Of Hand Book on Public Sector Performances Reviews.Washinton D. C : The World Bank.

Sidik, Machfud, 2002 , Kebijaksanaan Implementasi Pandangan Kedepan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, *Makalah Seminar Nasional*, Yogyakarta.

Sidik, Machfud, 2000 , Perimbangan Keuangan Pusat dan Kaerah Sebagai Pelaksanaan Desntralisai Fiskal, *Makalah Seminar Nasional*, Yogyakarta.

Singarabun dan Effendi, (ed), 1989 , *Metode Penelitian Survey*, LP3ES , Jakarta.

Sugiyono. , 2005, *Metode Pendekatan Bisnis*, Alfabeta.

Sukadana, I Wayan., Desentralisasi dan Eksistensi Korupsi di Indonesia, program pasca sarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Sukirno, Sudono., 2004, Makro *Ekonomi Teori Pengantar*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Suprayogi, Roy., 2004,Analisis Pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap PDRB di kota Pasuruan, *Skripsi (S1)*, EkonomiPembangunan. Brawijaya.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: andi Yogyakarta.

Tudaro, Michael P.,1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*,terjemahan Haris Murandi ,Erlangga,Jakarta.

UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah beserta Penjelasannya, Citra Umbara, Bandung.

Vasquez, Jorge M and McNab, Robert., 2005, Fiscal desetralization and Growth, *Working peper,*No 05/ 06 february.

Vasquez, Jorge M and McNab, Robert.,2001, Fiscal desetralization andGrowth, *Working peper,*No 01/ 01 january.

World Bank ., 1997, *On Line Sourcebook on Desentralization and Rural Development,*Desentralization Thematik team,SDA.

Zhang, Tao and Zou, Heng Fu., 1998, Fiscal Desntalizaion, Publik Spending and Economic Growth in China, *Jurnal Of public economic,*vol 67.